

## ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. Kenyataannya, pekerja makin sulit mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penelitian ini untuk mengungkap Kebijakan Rekonstruksi Konsep ( Upah Minimum Regional ) UMR Dalam Upaya Pembaharuan Hukum ketenagakerjaan Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) saat ini sudah sesuai dengan nilai Keadilan Pancasila? (2) Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) saat ini ? (3). Bagaimana Rekonstruksi Upah Minimum Regional (UMR) yang berbasis nilai Keadilan Pancasila? Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory* dikemukakan Plato, Teori Penegakan Hukum Sebagai *Middle Theory* terutama dalam mendukung prinsip hak asasi, dan *Applied Theory*, dalam penelitian ini adalah Teori Hukum Progresif mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Upah Minimum Regional (Umr) Belum Sesuai dengan Nilai Keadilan Pancasila. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan UMR diantaranya: Kelemahan Substansi Hukum, meliputi: Kelemahan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Kelemahan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013, Kelemahan Usulan Revisi Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per- 03/Men/1997 tentang UMR. Kedua, Kelemahan dalam Struktur Hukum, meliputi Dewan Pengupahan, Mekanisme dan Proses Lahirnya Upah Minimum di Dewan Pengupahan, kemanfaatan Peluang di Dewan Pengupahan sebagai Strategi Memperjuangkan UMR dan Kelemahan Dalam Budaya Hukum meliputi Kelemahan Budaya *nrimo*, dan Kompetensi Kerja Rendah serta kurang Meningkatnya Prestasi Kerja. Rekonstruksi Upah Minimum Regional (UMR) Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. UMR Berdasarkan Nilai-nilai Al-qur'an dan Al-Hadist, Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. UMR Berdasar Nilai-nilai Keadilan Pancasila, Nilai- nilai Pancasila Sejak tahun 2003, berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir Pancasila. Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang mengakomodir dan (harusnya) juga bersifat memaksa sebagai pandangan hidup semua orang yang mengaku Bangsa Indonesia. Dan menjadi sifat dasar bagi semua rakyat Indonesia dalam bermasyarakat dan berkeadilan. Rekonstruksi Upah Minimum Regional (UMR) yang berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila. Rekonstruksi UMR akan berbasis nilai-nilai keadilan Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tiga tataran nilai itu, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

Kata kunci : Keadilan, Upah dan Hak.

## ABSTRACT

Employment issues in Indonesia is set in article 5 paragraph (1), Article 20 (2) of Article 27 paragraph (2) of Article 28 and Article 33 paragraph (1) Constitution 1945. Government set wages through. Minister of Man power and Transmigration No. 7 of 2013 concerning Minimum Wage. In the fact, workers increasingly difficult to achieve the Living Needs (KHL). This research to uncover Reconstruction Policy Concept (Minimum Wage) UMR In employment Legal Reform Efforts Indonesia. Problems in this study as follows: (1) Is the implementation of Minimum Wage (UMR) is now in accordance with the values of Pancasila Justice? (2) How Downside Implementation of Minimum Wage (UMR) at this time? (3). How Reconstruction of Regional Minimum Wage (UMR) based on values of Pancasila Justice? Grand Theory Theory of Justice As Plato stated, Theory of Law Enforcement For Middle Theory especially in support of the principles of human rights, and Applied Theory, this research is the theory of Progressive Law leads man to life fair, prosperous, and make people happy. The results showed that the implementation of Minimum Wage (UMR) There Value In accordance with Pancasila Justice. Implementation weakness weakness UMR include: weakness Substance Law, include: weakness Suspension of Implementation of Minimum Wage, weakness . Minister of Man power and Transmigration No. 7 of 2013, weakness Proposed Revision Working Regulation No. Per-03 / Men / 1997 on the minimum wage. Second, the weakness in the structure of law, including the Wage Council, Mechanisms and Processes birth of Minimum Wages on Wage Council, expediency Opportunities in the Wage Council as Strategy Fighting for wage and Weaknesses In Law Culture include weakness Culture nrimo, and Competence Low and less Improved Job Performance. Reconstruction of Regional Minimum Wage (UMR) the value based justice Pancasila. UMR Based on the values of the Qur'an and Al-Hadith, In human life, not everyone can work for himself, because of the lack of working capital, so it should work for other people. UMR based on the value of justice Pancasila. Pancasila Values Since 2003, based on the MPR decree no. I / MPR / 2003, 36 grains of guidelines Pancasila has been changed to 45 Pancasila. The basic principle of the Unitary Republic of Indonesia is Pancasila which accommodates and (should) also be forced as the way of life of all those who claim the Indonesian nation. And the nature of the foundation for all the people of Indonesia in community and justice. Reconstruction of Regional Minimum Wage (UMR) based values Pancasila. Rekonstruction Justice UMR will be based values of Pancasila because Pancasila justice is the foundation of the Indonesian state. Three levels that value, the base value, instrumental value, and the value of praxis.

Keywords: Justice, Wages and Rights.